

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



PKS

*Bersama Melayani
Rakyat*



KETUA MAJELIS SYURA PKS

**HASIL MMS VI,
PKS TOLAK WACANA
PENUNDAAN PEMILU**



PRESIDEN PKS

**TUNJUK 10
JURU BICARA PARTAI**



SEKRETARIS JENDERAL PKS

**LIMA HAL YANG HARUS
DIMILIKI OLEH SEORANG
ENTREPRENEUR**



AJAKAN KOLABORASI

Ajakan Kolaborasi



Kolaborasi nampak hanya jargon pemanis acara-acara seremoni. Atau setidaknya dalam spanduk dan baliho-baliho. Kolaborasi tidak boleh berhenti pada ranah kata. Bahwa kata penting dan perlu, iya. Menjadikan kata

menjadi karya juga tak kalah pentingnya. PKS sedang mengaplikasikan semangat ini, kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya bermakna mitra koalisi dalam sebuah perhelatan politik. Bagi

partai politik modern, kolaborasi menembus sekat-sekat kerja politik an sich. Maka digelarlah Silaturahmi Kebangsaan. Berkunjung dan membuka diri ke partai politik lain, ke berbagai ormas lintas

agama, ke berbagai kelompok masyarakat sipil. Maka digelarlah Silaturahmi Kebangsaan. Bertandang ke daerah-daerah. Berkunjung ke wilayah-wilayah. Langsung oleh pimpinan tertinggi partai, bergantian, berbagi peran, berbagi kesempatan.

Dibuka keran seluas-luasnya bagi siapa saja untuk berkolaborasi dengan PKS. Komunikasi semakin intens, kedekatan semakin kuat.

Hubungan yang erat dimulai dari komunikasi awal bukan. Bahasa mudahnya memperkenalkan diri. Lewat mengenal menjadi paham. Sesudah paham menjadi mengerti. Usai mengerti terbitlah kolaborasi.

Lewat kolaborasi, stigma-stigma menjadi tidak relevan. Apa yang beredar di polusi udara informasi jelas tak lebih jernih saat bersua dan bercengkrama.

Pintu kantor-kantor PKS dari pusat hingga daerah tak pernah tertutup. Aktivasnya tak pernah berhenti. Pintu

selalu terbuka, bagi siapa saja anak bangsa untuk sekadar berbincang ringan, saling mengenal.

Maka PKS bersyukur ada banyak tokoh yang berkenan mau membantu PKS sebagai Dewan Pakar. Lintas kepakaran. Mulai dari guru besar dalam dan luar negeri, tokoh lintas agama, pakar olahraga level olimpiade, pakar kesehatan masyarakat, purnawirawan TNI, Polri dan Birokat, dunia usaha, wartawan senior, aktivis lintas gerakan dan lain-lainnya.

Inilah wujud kata menjadi karya. Bergabungnya tokoh lintas kepakaran akan menguatkan pandangan PKS, semakin menjernihkan arah kebijakan PKS, semakin kaya dan lengkap dan yang utama: amat bisa dipertanggungjawabkan.

Ajakan kolaborasi ini akan terus terbuka bagi seluruh anak bangsa. Siapa saja dia. PKS membuka pintu seluasnya. Datang saja dulu, nanti kita cerita apa yang akan terjadi hari ini.

**Dewan Pakar**

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

“Dengan adanya kepakaran-kepakaran dari bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersinergi bersama, membuat PKS bisa semakin diterima di tengah masyarakat kita dan memberikan solusi konkrit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan,”

H. Ahmad Syaikhu

Presiden PKS

Dewan Pakar

DPP PKS Lantik Dewan Pakar, Berbagai Tokoh Siap Berjuang Bersama PKS

“Dewan Pakar PKS terdiri dari beragam latar belakang yang mencerminkan bangsa yang majemuk dan siap berjuang bersama PKS. PKS membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berkontribusi terhadap jalannya demokrasi yang jauh lebih baik ke depan. Dengan adanya Dewan Pakar PKS, kami ingin meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang lebih substantif,”

Ahmad Fathul Bari

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS

Dewan Pakar

Evalina Heryanti, Perempuan Kristiani Pakar Olimpiade Gabung Dewan Pakar PKS

"Saya sangat senang dan bangga bergabung menjadi Dewan Pakar PKS di bidang olahraga dan prestasi. Puji Tuhan saya mengapresiasi PKS, dimana partai ini dikenal sebagai partai yang pemilihnya orang Islam, tapi saya sebagai seorang kristiani bisa masuk sebagai anggota Dewan Pakar,"

Evalina Heryanti

Anggota Dewan Pakar PKS

Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melantik sejumlah anggota Dewan Pakar, Senin (24/1/2022) acara pelantikan dihadiri langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikh.

Ada hal yang menarik dalam pelantikan Dewan Pakar PKS, salah satu anggotanya Evalina

Heryanti yang pernah menjadi Data Analysis and Assistance Team NOC of Indonesia for Olympic Games 2020 Tokyo, adalah perempuan non muslim yang mengaku senang dilantik menjadi anggota Dewan Pakar.

"Saya sangat senang dan bangga bergabung menjadi Dewan Pakar PKS di bidang



olahraga dan prestasi," tutur Eva.

la menjelaskan bergabung sebagai Dewan Pakar, menjadi bukti bahwa PKS partai politik yang terbuka bagi semua anak bangsa tanpa memandang suku agama dan golongan.

"Puji Tuhan saya mengapresiasi PKS, dimana partai ini dikenal sebagai partai yang pemilihnya orang Islam, tapi saya sebagai seorang kristiani bisa masuk sebagai anggota Dewan Pakar," ucap Eva.

Ini menunjukkan PKS partai

yang terbuka bagi semua anak bangsa tanpa memandang suku agama apapun, kita bersama-sama disini

memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara," pungkasnya.

Dewan Pakar

Jadi Dewan Pakar PKS, Brig Jen Pol (Purn) Abdul Ghany Siap Dorong Pembangunan Demokrasi

"Agar meningkatkan lagi peran PKS dalam rangka mendorong dan memelopori jalannya pembangunan demokrasi di Indonesia dan pembangunan Indonesia pada umumnya. Kita akan selalu berusaha untuk membaca situasi dimana masalah-masalah yang perlu kita dukung secara khusus dalam rangka meningkatkan lagi fungsi dan peran PKS terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia,"

Brig Jend Pol (Purn) Abdul Ghany Abubakar
Anggota Dewan Pakar PKS

Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melangsungkan pelantikan Dewan Pakar PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Senin (24/01/2022).

Salah satu yang tergabung dalam anggota Dewan Pakar PKS adalah Purnawirawan dari Bigradir Jenderal Polisi Drs. Abdul Ghany Abubakar yang menyatakan siap mendorong PKS dalam mempolopori jalannya pembangunan Demokrasi.

"Agar meningkatkan lagi peran PKS dalam rangka mendorong dan memelopori jalannya pembangunan demokrasi di Indonesia dan pembangunan Indonesia pada umumnya," ungkap Abdul Ghany.

Abdul Ghany menekankan pembangunan demokrasi ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih tertib dan nyaman.

"Ini dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang



lebih nyaman, lebih tertib, menuju rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera," terang Abdul Ghany.

Abdul Ghany menyatakan sumbangsihnya untuk PKS dengan mengkaji

permasalahan yang dapat meningkatkan peran PKS dalam pembangunan demokrasi.

"Kita akan selalu berusaha untuk membaca situasi dimana masalah-masalah yang perlu

kita dukung secara khusus dalam rangka meningkatkan lagi fungsi dan peran PKS terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia," ucapnya.

Dewan Pakar

Lewat PKS, Prof Erry Ingin Bangun Pendidikan Indonesia yang Bersifat Global



Jakarta -- Pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat pusat yang dilaksanakan pada Senin (24/01/2022) menghadirkan banyak potensi kepakaran dari berbagai lintas sektoral salah satunya bidang pendidikan.

Profesor di International Islamic University Malaysia (IIUM) Profesor Erry Yulian T. Adesta, Ph.D., C.Eng., MIMechE, IPM, salah satu Dewan Pakar PKS, mengungkapkan akan menyumbangkan pemikirannya untuk

membangun pendidikan Indonesia yang bersifat global.

"Saya akan mencoba untuk tetap berada di bidang yang telah saya tekuni selama 15 tahun ini, yaitu dengan membangun suatu dunia pendidikan yang bersifat global. Jadi saya ingin agar kita tidak lagi eksklusif hanya melihat ke dalam tapi juga melihat ke luar," ungkap Prof. Erry.

Prof. Erry mengatakan saat ini dirinya akan fokus untuk

memajukan pendidikan Indonesia.

"Yang sekarang saya fokuskan adalah agar kita dapat memajukan pendidikan kita selaras atau bahkan melebihi dari pendidikan negara-negara di sekeliling kita, terutama Malaysia," ucap Prof. Erry.

"Sehingga pendidikan itu dapat menjadi suatu barometer keberhasilan suatu bangsa," lanjut dia.

Prof. Erry mencontohkan

"Saya akan mencoba untuk tetap berada di bidang yang telah saya tekuni selama 15 tahun ini, yaitu dengan membangun suatu dunia pendidikan yang bersifat global. Jadi saya ingin agar kita tidak lagi eksklusif hanya melihat ke dalam tapi juga melihat ke luar. Yang sekarang saya fokuskan adalah agar kita dapat memajukan pendidikan kita selaras atau bahkan melebihi dari pendidikan negara-negara di sekeliling kita, terutama Malaysia atau paling tidak unggul di Asia,"

Profesor Erry Yulian T. Adesta, Ph.D., C.Eng., MIMechE, IPM

Anggota Dewan Pakar PKS

negara Malaysia yang unggul dalam sistem pendidikan dapat menjadi ikon pendidikan di negara-negara Asia, padahal pada awal tahun 70-an justru Indonesia yang banyak kedatangan pelajar dari Malaysia bahkan sampai mengirimkan guru kesana.

"Nah, keadaan seperti ini harus menjadi pemicu bagi kita untuk dapat menjadikan pendidikan tinggi Indonesia menjadi high, atau paling tidak

unggul di Asia," katanya.

Prof. Erry menyatakan siap menyumbangkan pemikirannya untuk memajukan pendidikan Indonesia lewat PKS.

"Untuk itu apapun yang sudah saya dapatkan dari Malaysia akan saya sumbangkan demi untuk pendidikan tinggi di Indonesia melalui berbagai jalur, utamanya lewat PKS," pungkas Prof. Erry.

Dewan Pakar

Dr Agus Ismail, Dewan Pakar PKS Termuda Siap Kaji Isu untuk Gaet Kalangan Milenial



Jakarta -- Peneliti Bidang Energi Baru dan Terbarukan Dr. Agus Ismail, M.Eng., mengungkapkan pengalamannya dalam Pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

sebagai Dewan Pakar PKS termuda. "Menjadi kehormatan bagi saya. Saya bisa bergabung ke dalam lembaga baru yang ada di DPP PKS, yaitu Dewan Pakar

PKS. Apalagi ternyata saya merupakan salah satu anggota yang termuda," ungkapnya dalam wawancara lewat pesan suara pada Rabu (26/01/2022).

Dr. Ismail yang juga merupakan

seorang dosen menyatakan siap menyumbangkan kepakarannya dalam bentuk usulan dan pertimbangan yang bersifat ilmiah khususnya terkait isu-isu yang menjadi perhatian kalangan milenial.

"Saya akan memberikan kepakaran dan kompetensi yang saya miliki untuk saya berikan usulan dan masukan kepada PKS dengan dasar scientific, khususnya untuk terkait isu yang dekat dengan milenial seperti lingkungan, energi terbarukan, mobil listrik, dan sebagainya," jelas Dr. Ismail.

Dr. Ismail berharap dengan kepakaran dan kompetensi yang dimiliki, para Dewan Pakar PKS bisa saling egaliter dan mendukung satu sama lain.

"Saya berharap dengan kepakaran dan kompetensi yang dimiliki semua anggota Dewan Pakar, kita bisa saling menghormati, egaliter, serta mendukung rencana pemenangan PKS di Pemilu

2024. Tentu sebagai anak muda kami memiliki semangat yang sangat besar dan harapannya para orang tua yang memiliki kebijaksanaan yang baik sehingga kami para anak muda di dewan pakar bisa banyak belajar," tutur Sekretaris Dewan Pakar PKS ini.

Dr. Ismail menyebutkan beberapa Anggota Dewan Pakar Muda yang bergabung seperti Dr. Hermawan, juga Arif Nursalim yang biasa dikenal dengan Salim A Fillah. Dia menyampaikan Anggota Dewan Pakar Muda ini dapat memberikan kontribusi terbaik.

"Mudah-mudahan kami para anak muda bisa memberikan kontribusi terbaik di Dewan Pakar PKS ini. Saya juga akan memberikan pengetahuan saya atas isu-isu terkini yang bisa memberikan kontribusi untuk para stakeholder di DPP PKS sehingga apa yang saya sampaikan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi juga ada kajian ilmiah yang strategis," urai dia.

**DPTP**

Dr. Salim Berharap Tahun 2022 Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

“Melihat kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2021 masih berfluktuasi dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka perlu komitmen kuat untuk prioritas program kesejahteraan. Turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk bisa diselesaikan dengan Program pemulihan ekonomi,”

Dr. Salim
Ketua Majelis Syura PKS

DPTP

Presiden PKS Tunjuk 10 Juru Bicara Partai

Kesepuluh Juru Bicara Resmi PKS antara lain Ketua DPP PKS Bidang Polhukam AI Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruuri, Ketua DPP PKS Bidang Kesos Netty Prasetyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Gamal Albinsaid, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Zainudin Paru, Ketua Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Anggota KSP PKS Muhammad Iqbal dan Muhammad Kholid.

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul Munir menunjuk 10 orang Juru Bicara Resmi PKS.

Sepuluh juru bicara resmi PKS ini ditunjuk sebagai pihak yang akan banyak berkomunikasi dengan publik tentang berbagai perjuangan yang dilakukan oleh PKS.

Syaikhul Munir menyebut tugas juru bicara adalah jembatan menyampaikan setiap kebijakan partai dan menangkap setiap masukan yang diberikan dari publik.

"Komunikasi publik sudah kita

buka seluas-luasnya sejak partai ini berdiri. PKS di pusat juga mendapat penghargaan keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan PKS di wilayah banyak yang mendapatkan penghargaan serupa dari Komisi Informasi Provinsi. Hadirnya juru bicara resmi akan semakin memudahkan komunikasi antara PKS dan publik," ujar Syaikhul Munir.

Kesepuluh Juru Bicara Resmi PKS antara lain Ketua DPP PKS Bidang Polhukam AI Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruuri, Ketua DPP PKS Bidang Kesos Netty

Prasetyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Gamal Albinsaid, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Zainudin Paru, Ketua Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Anggota KSP PKS Muhammad Iqbal dan Muhammad Kholid.

"Masing-masing juru bicara adalah personal yang sudah terbiasa menjalin komunikasi publik dan memiliki kapasitas khusus pada bidangnya yang InsyaAllah mencakup banyak hal yang tengah menjadi perhatian publik dan



PKS," ujar Syaikhul Munir.

Syaikhul Munir tak lupa berterimakasih kepada media yang selama ini telah menjadi jembatan informasi antara PKS dan publik. PKS melihat peran besar media sebagai pilar demokrasi keempat yang membantu masyarakat melihat dan mendengar apa sikap PKS terhadap sebuah persoalan.

Termasuk kepada kekuatan sipil, ahli, akademisi dan para pakar yang selama ini terus menjalin komunikasi intens dengan PKS.

"Lewat juru bicara PKS insyaAllah hubungan dengan teman-teman media akan jauh lebih intens dan semakin berkualitas," ungkap Syaikhul Munir.

SIARAN PERS

MUSYAWARAH MAJELIS SYURA VI PKS

Pada Kamis, 13 Januari 2022 telah dilaksanakan Sidang Musyawarah Majelis Syura (MMS) VI Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Bidakara, Jakarta. Sidang MMS VI PKS menghasilkan beberapa poin keputusan sebagai berikut:

1

PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD NRI 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998.

2

PKS Mendukung Judicial Review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional.

3

PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa untuk membangun titik temu dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa.

**DPTP**

Hasil MMS VI, PKS Tolak Wacana Penundaan Pemilu

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. PKS meminta untuk tetap merawat Demokrasi dan semangat Reformasi 1998,”

Dr. Salim

Ketua Majelis Syura PKS



Entrepreneur & Youth SUMMIT 2022

DPTP

Habib Aboe: Lima Hal Yang Harus Dimiliki Oleh **Seorang** Entrepreneur

“Pertama harus percaya diri. Yang kedua harus berorientasi kepada usaha dan hasil. Ketiga adalah mereka yang berani mengambil resiko. Yang keempat dan kelima adalah leadership serta punya pandangan jauh kedepan dan berorientasi pada masa depan. Saya berharap melalui forum yang dibuat BPJE dan Bidang Kepemudaan akan dapat dilahirkan para entrepreneur yang mumpuni, PKS memiliki keinginan yang tinggi menumbuhkan kewirausahaan di tengah masyarakat,”

Habib Aboe Bakar Al Habsyi, S.E.
Sekretaris Jenderal PKS


PKS**DPTP**

Dr Salim Beri Inspirasi Peserta Entrepreneur & Youth Summit 2022

“Ungkapan himmatur rijal tahdimul jibal, semangat pemuda mampu meruntuhkan gunung, apalagi jika disatukan dengan satu visi misi dan tujuan mulia. Pentingnya karakter kemandirian, mandiri dalam mewujudkan keputusan, tidak bergantung kepada orang lain tapi hanya menggantungkan cita-citanya kepada Allah,”

Dr. Salim

Ketua Majelis Syura PKS

DPTP

Dr Salim Hadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Kader Penyuluh Indonesia

"Setelah saya memperhatikan, mengamati di lapangan apa yang telah dilakukan oleh para kader penyuluh yang sangat tangguh saya memberikan apresiasi atas kinerja dalam melayani masyarakat dari saat kandungan sampai lansia, ini sesuatu yang luar biasa tanpamarih dan penuh keikhlasan,"

Dr. Salim

Ketua Majelis Syura PKS

Jakarta-- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al Jufri menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) Sabtu (12/1/2022).

Dr Salim hadir bersama Presiden PKS Ahmad Syaikh, dalam sambutannya mantan Menteri Sosial di era Kabinet Indonesia Bersatu II itu memberikan apresiasi atas kinerja kader Penyuluh yang menjadi garda terdepan dalam kesejahteraan masyarakat.

"Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Munas

Hikapindo ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa," ucap Dr. Salim.

"Setelah saya memperhatikan, mengamati di lapangan apa yang telah dilakukan oleh para kader penyuluh yang sangat tangguh saya memberikan apresiasi atas kinerja dalam melayani masyarakat dari saat kandungan sampai lansia, ini sesuatu yang luar biasa tanpamarih dan penuh keikhlasan," lanjutnya.

Ia juga menyoroti upah kader penyuluh yang masih sangat rendah, ia menganggap perlu ada keseriusan dari pemerintah



dalam memperhatikan kesejahteraan dari para kader penyuluh.

"Honor yang diberikan negara kepada para kader rendah sekali ini membuat kita cukup prihatin sebagai anak bangsa

ini diperlukan political will perhatian dan keinginan dari negara, tutur Salim

"Sudah tujuh kali ganti Presiden, negara belum memberikan perhatian khusus dan juga kesejahteraan kepada

para kader, dengan adanya Himpunan ini diharapkan menjadi wadah bagi kita semua untuk mengantarkan para kader menuju sejahtera," pungkasnya.

DPTP

Presiden PKS Apresiasi Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai DKI Jakarta



"Ide semacam ini menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya menjaga dan merawat DAS. Ini sebuah hal yang langka di era kekinian,"

H. Ahmad Syaikh

Presiden PKS

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikh mengapresiasi gagasan terbentuknya Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) DKI Jakarta.

"Ide semacam ini menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya menjaga dan merawat DAS. Ini sebuah hal yang langka di era kekinian,"

ungkap Syaikh dalam agenda Penguatan Pembina Forum DAS DKI Jakarta, Ahad (23/01/2022).

Syaikh mengatakan Forum

DAS DKI Jakarta hadir di waktu yang tepat.

"Meningat DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara yang dilalui cukup banyak sungai. Mengalir dari Bogor dan bermuara di Laut Jawa. Jika DAS tidak diperhatikan secara optimal maka potensi ancaman banjir di Jakarta akan semakin mengkhawatirkan," terang Syaikh.

Syaikh menekankan soal DAS ini perlu menjadi kepedulian bersama, sebab dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 terdapat klausul yang menghilangkan kewajiban pemerintah dalam menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

"Kawasan hutan minimal 30% tersebut untuk optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Bisa

dibayangkan, penghapusan ini akan membuat persoalan lingkungan di DAS akan semakin rumit. Selain itu potensi ancaman banjir di sepanjang DAS juga semakin tinggi, padahal adanya ketentuan 30% saja permasalahan banjir belum dapat terselesaikan dengan baik," urai Syaikh.

Syaikh berharap dengan hadirnya Forum DAS DKI Jakarta ini dapat membantu Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir.

"Saya mendukung perjuangan Forum DAS dalam menjaga daerah aliran sungai dengan kolaborasi bersama berbagai pihak dalam membangun kemandirian gerakan dengan menciptakan ruang pendidikan, latihan, dan kerja nyata bagi kelompok yang tergabung dalam forum untuk menciptakan kesinambungan generasi yang peduli terhadap DAS Jakarta," tutur Syaikh.

**PKS**Bersama Melayani
Rakyat**Juru Bicara**

Juru Bicara PKS: Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Ugal-ugalan

“Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan dan menegaskan partisipasi masyarakat. Banyak substansi yang belum dibahas. Padahal banyak para ahli dari berbagai disiplin Ilmu mengingatkan agar pembahasan IKN jangan terburu-buru. Masterplan, Rencana Induk, masalah pertanahan dan pendanaan belum dibahas Pansus,”

Pipin Sopian

Juru Bicara PKS



Juru Bicara

PKS: Pindah Ibu Kota akan Memperbanyak Kasus 'Layangan Putus'

“Memindahkan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan, tetapi memindahkan kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehidupan rumah tangga setiap warga itu kompleks. Demikian juga dengan komunitas yang sudah terbangun dan modal sosial yang sudah terbangun dengan baik akan hilang. Jika tetap memaksakan akan ada banyak kasus ‘layangan putus’ perselingkuhan bahkan perceraian akibat ambisi segelintir elit,”

Muhammad Iqbal

Juru Bicara PKS



Juru Bicara

Pemerintah Korbankan Ekonomi Rakyat **Demi Pindah Ibu Kota**

“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima PEN. Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020,”

Muhammad Kholid

Juru Bicara PKS

**PKS**Bersama Melayani
Rakyat**Juru Bicara**

Edy Mulyadi Tidak Ada Hubungannya dengan Suara Resmi PKS

“Tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan (Edy Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS). Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS,”

Ahmad Mabruri

Juru Bicara PKS



Bidang Badan

Aturan Mendagri Countproductive Dan Akan Memperburuk Kondisi Ekonomi Masyarakat



Kebijakan baru yang dikeluarkan Mendagri terkait aplikasi PeduliLindungi bisa menjurus pada kontrol total oleh negara terhadap masyarakat, yang tidak sehat untuk civil liberty dan data privacy kedepannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni.

Menurut Farouk, kebijakan ini tidak tepat karena juga akan berdampak negatif terhadap

ekonomi masyarakat. "Secara jumlah unit, persentase UMKM adalah 99,99% dari seluruh pelaku usaha, kebijakan terkait aplikasi PeduliLindungi hanya akan mempersulit bisnis mereka," katanya, Kamis (30/12/2021).

Sebagaimana diketahui, per 21 Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneken Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan

Aplikasi PeduliLindungi.

Di dalamnya diatur kewajiban bagi penyelenggara tempat publik untuk memasang aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat umum punya sarana menunjukkan apakah dirinya sudah divaksin atau belum. Seterusnya akan ada sanksi tegas jika ada penyelenggara terbukti melanggar aturan. Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional sebuah tempat usaha.

Farouk Alwyni mengatakan, SE Mendagri adalah counterproductive, bukan saja menyulitkan bisnis UMKM untuk bangkit, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak memahami persoalan vaksinasi Covid-19.

Di sisi lain, studi juga membuktikan vaksin-vaksin yang ada sekarang ini sebagai leaky vaccine, yakni vaksin

yang tidak bisa mencegah penularan Covid-19. Artinya, orang yang telah divaksin pun masih bisa tertular dan juga bisa menularkan virus.

Secara internasional, Farouk menjelaskan, kasus kematian penerima vaksin dosis penuh banyak ditemui pada kelompok lanjut usia dan yang mempunyai penyakit bawaan. Padahal tujuan utama vaksin adalah melindungi kelompok ini.

Di sinilah menurutnya kebijakan vaksinasi secara umum patut dikaji ulang. Lebih-lebih, tingkat kematian Covid-19 yang berada di kisaran 3,38 persen banyak di antaranya berasal dari kelompok rentan.

Dalam kondisi sekarang, kata Farouk, strategi yang lebih perlu dilakukan adalah focused protection, yakni fokus melindungi kelompok rentan di antaranya mereka yang berusia lanjut (di atas 65 tahun), kelompok yang masuk kategori obesitas, maupun yang

memiliki diabetes. "Mereka lah sebenarnya yang mayoritas berkontribusi terhadap kematian," jelas Farouk.

Dengan penanganan yang lebih terarah, kata Farouk, maka sebetulnya pemerintah tak perlu mengeluarkan larangan mubazir sebagaimana diambil oleh Mendagri. Kebijakan ini hanya akan meneruskan terpuruknya pertumbuhan ekonomi yang sudah terjungkal di kuartal tiga tahun 2021.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih sensitif dan menyadari kesulitan hidup masyarakat banyak akibat berbagai kebijakan penanganan Covid-19 yang diambilnya.

Tanpa sensitifitas dan kerendahan hati, kata Farouk, pemerintah hanya akan mendapati bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus memburuk, dan pihak yang paling menanggung persoalan ini akhirnya adalah masyarakat menengah ke bawah.

Bidang Badan

Ketua DPP PKS BPW Intim Canangkan Kick Off Perekrutan Pejabat Politik PKS Se-Indonesia Timur



AMBON (20/12). Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memulai acara Kick Off Rekrutmen Pejabat Politik PKS pada Rabu (15/12/2021) pekan lalu di Jakarta. Launching pembukaan pendaftaran pejabat politik yang dilakukan sejak dini, dilakukan langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikh. Gelaran Kick Off sebagai bekal untuk mengantarkan

kemenangan PKS pada pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur, Muhammad Kasuba, mengambil langkah cepat. Dirinya hadir di Kota Ambon Provinsi Maluku pada Minggu (19/12/2021), memastikan tindak lanjut dan sosialisasi pembukaan pendaftaran pejabat berjalan simultan di

Indonesia Bagian Timur.

“Seluruh struktur PKS di Indonesia Bagian Timur harus memastikan kesiapannya untuk menyukseskan agenda rekrutmen pejabat publik, menyambut pemilu tahun 2024”, tegas Muhammad Kasuba.

Dirinya menandakan, launching pembukaan pendaftaran pejabat publik yang digelar bersama jajaran pengurus DPW dan DPD PKS Se-Provinsi Maluku merupakan bagian dari desain strategis untuk membuka dan memperluas jangkauan keterlibatan berbagai kalangan untuk berjuang bersama PKS dengan menjadi Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD).

“Saya perhatikan, banyak kalangan yang menaruh perhatian luas untuk bergabung berjuang bersama PKS. Antara lain dengan menjadi Bakal Calon Anggota Dewan. PKS di Indonesia Timur menyambut baik, mengajak semuanya, bergabung bersama PKS untuk menjadi wadah

berjuang”, sebut Muhammad Kasuba.

Perekrutan BCAD sejak dini sebut Muhammad Kasuba merupakan sarana untuk penyaringan dan penjaringan calon legislator PKS. “Pemilu 2024 masih beberapa tahun lalu. Namun PKS di Indonesia Timur sejak dini bersiap diri. PKS menjadi partai terbuka, jika para tokoh masyarakat, maupun anak-anak muda milenial ingin berhimpun bersama PKS”, lanjutnya.

Bagi Muhammad Kasuba, Indonesia Timur baik di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat memiliki kekhasan sosiologis, keragaman identitas maupun kultural. PKS telah menampung berbagai kekhasan dan latar belakang itu untuk membangun semangat kolaborasi, berjuang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat luas.

“Sejak PKS berdiri dan berjuang dalam lini politik, telah bergabung tokoh dan kader partai dengan latar kekhasan dan keragaman tersebut. PKS

ingin menjadi wadah bagi kebhinekaan di Indonesia Timur secara khusus maupun Indonesia secara nasional”, imbuhnya.

PKS di Indonesia Timur menargetkan lompatan capaian elektabilitas sebagaimana road map yang telah ditetapkan pada Pemilu 2024. “PKS di Indonesia Timur memiliki target menang dengan lompatan elektabilitas yang jauh lebih signifikan dari Pemilu 2019. BCAD menjadi salah satu variabel kemenangan”, urainya.

Muhammad Kasuba menginstruksi jajaran struktur PKS di Indonesia Timur untuk membuka kanal rekrutmen Bakal Calon Anggota Dewan dari berbagai kalangan sehingga keinginan berhimpun dengan PKS dapat tersalur. “Buka kanal-kanal rekrutmen BCAD. Terbuka untuk berbagai kalangan. PKS menjadi milik bersama bagi masyarakat Indonesia Timur”, tegas mantan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan 2 (dua) periode ini.

Bidang Badan

Awali Tahun 2022, PKS Edukasi Pekerja Migran Agar Bijak Menggunakan Gaji

Tahun baru, semangat baru. Ungkapan itu layak disematkan kepada Departemen Pekerja Migran, Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS. Memasuki hari kedua di tahun baru 2022, Departemen yang diketuai oleh Fathurrahman ini langsung tancap gas dengan melanjutkan kuliah online sesi ke enam Akademi Pekerja Migran Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (APMI PKS).

Dalam sesi kali ini, tema yang dibahas adalah “Dimensi Langit Kunci Sukses Migran Sejahtera” yang dibawakan oleh Elsa Febiola Aryanti, SE., MSCIS., MM, seorang financial planner yang berpengalaman dalam perencanaan keuangan. Sementara itu, hadir memberikan sambutan adalah Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS dan juga anggota DPR RI Komisi IX FPKS, Kurniasih Mufidayati.

Dalam sambutannya, Mufida mengharapkan dengan adanya APMI semoga mampu memberikan kontribusi positif

bagi para PMI untuk bisa lebih baik lagi kedepannya.

Dengan tema yang diangkat kali ini tentang perencanaan keuangan, harapannya bisa membantu PMI dalam mengelola keuangan yang lebih baik, apalagi ditengah kondisi pandemi yang belum jelas sampai kapan akan berakhir.

“Ditengah pandemic covid-19 yang belum jelas kapan berakhir, PMI harus semakin cermat dalam mengelola keuangannya”.

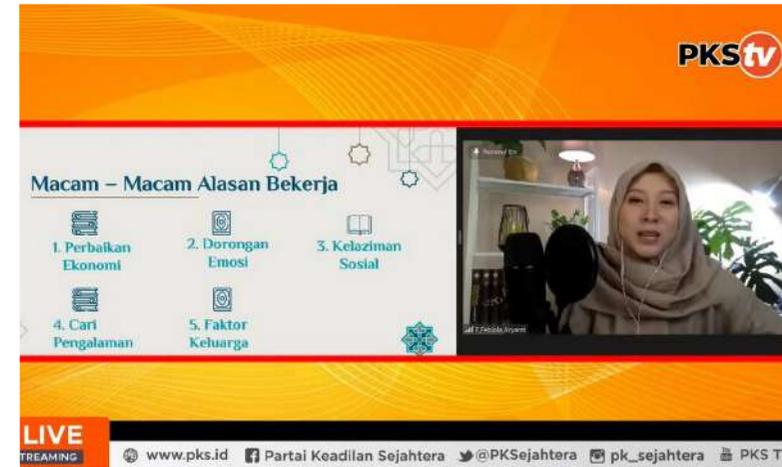
Diakhir sambutannya Mufida ingin, agar kedepannya PKS melalui APMI-nya bisa terus konsisten dan semakin banyak memberikan kontribusi dan manfaat kepada semua PMI di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dalam kuliahnya, Febi memaparkan empat hal pokok yang perlu dipahami oleh PMI, dalam bekerja, pertama, pentingnya mengidentifikasi tujuan dalam bekerja, kedua, memperbaiki

tujuan bekerja, ketiga, bagaimana melekatkan tujuan bekerja hanya kepada Allah SWT, dan keempat, mengaplikasikan tujuan bekerja berdimensi langit dalam hal pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman yang ditemuinya dilapangan, Febi menjelaskan ada berbagai alasan mengapa PMI bekerja diluar negeri diantaranya adalah ingin adanya perbaikan ekonomi keluarga, dorongan emosi misalnya karena putus cinta atau ada saudara yang sudah bekerja lebih dahulu keluar negeri, kebiasaan daerah setempat yang warganya banyak bekerja keluar negeri, mencari pengalaman dan terakhir karena adanya faktor keluarga.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang muncul dari PMI Hongkong terkait penipuan yang berkedok investasi yang dialaminya hingga puluhan juta rupiah. Yang lebih



menyakitkan, investasi bodong tersebut dilakukan oleh teman PMI itu sendiri yang berperan sebagai agen.

Oleh karena itu Febi mengingatkan agar para pekerja migrant harus berhati-hati dalam hal ini. Kalau mau berinvestasi, pastikan lembaganya terdaftar dan dijamin oleh pemerintah, sebab jika terjadi permasalahan, akan sulit diselesaikan. D

Diakhir pembahasan, Febi menekankan akan pentingnya

aplikasi tujuan bekerja berdimensi langit dalam hal keuangan, diantaranya adalah bahwa rezeki yang diperoleh harus halal dan digunakan untuk sesuatu yang baik dan halal.

Dalam penggunaan penghasilan tersebut harus berimbang, tidak boros dan tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, penghasilan yang digunakan harus berorientasi kepada masa depan yaitu dunia dan akhirat. Dan terakhir, ada hak yang harus ditunaikan yaitu zakat, infak, shadaqah dan wakaf.

**PKS**

Bersama Melayani Rakyat

**Bidang Badan**

Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Harus Transparan dan Akuntabel

“Proses ini harus dan wajib memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sikap kami tegas dan jelas, bahwa pastikan para pengisi pejabat kepala daerah (baik Pj Gubernur/Bupati/Walikota) wajib memenuhi prasyarat sesuai UU serta memiliki rekam jejak dan integritas yang baik,”

Nabil Ahmad Fauzi

Ketua Departemen Politik Bidang Polhukam DPP PKS

Bidang Badan

BPKK DPP PKS Bertemu KPPG Golkar, Bahas Isu Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga



Jakarta-- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kantor DPP Partai Golkar untuk bertemu dengan Kesatuan Perempuan Partai Golkar, dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan, Selasa (11/1/2022).

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan

Keluarga DPP PKS, Diah Nurwitasari, beserta jajaran, dari Partai Golkar hadir Airin Rachmy Diany selalu ketua KPPG.

Dalam sambutannya, Diah mengungkapkan agenda silaturahmi kebangsaan merupakan agenda prioritas dari BPKK untuk mencari persamaan terkait isu perempuan dengan partai

politik lainnya.

"Agenda ini salah satu program kami (BPKK) hanya saja sejak pandemi menjadi tertahan," tutur Diah.

Kami meyakini kesamaan perempuan di partai politik jauh lebih banyak ketimbang perbedaannya, perbedaan tentu saja ada misal beda partai tapi kesamaan lebih banyak,

kita memiliki tujuan utama ikut menyejahterakan masyarakat Indonesia khususnya perempuan Indonesia," kata Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Diah juga menjelaskan fokus utama BPKK berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, anak dan ketahanan keluarga yang merupakan pondasi utama sebuah peradaban bangsa.

"Kami punya perhatian fokus kepada perempuan dan ketahanan keluarga, karena ini pondasi bangsa dan peradaban," terang Diah.

Berkaitan dengan RUU TPKS yang masih dalam pembahasan di DPR, ia menjelaskan PKS berkomitmen untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan seksual dan perlindungan korban, hanya perlu perbaikan dalam hal seksual consent yang masih menjadi perdebatan.

Berkenaan dengan RUU TPKS kami perlu menyampaikan PKS

punya komitmen yang kuat untuk menghukum pelaku tindak pidana seksual dan perlu ada payung hukum untuk melindungi korban," kata dia.

Dari PKS kami ingin melengkapi Dan menyempurnakan RUU ini berkenaan dengan seks bebas yang masih menjadi polemik," tegasnya.

Sementara Ketua KPPG Airin Rachmy menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dari BPKK, ia mengaku banyak kesamaan antar PKS dan Golkar terkait isu Perempuan dan Anak.

"Saya berterima kasih atas kunjungan untuk bersilaturahmi dan kita merasa memiliki kesepahaman antara PKS dan Golkar, kedepan mudah mudahan Persoalan gender perempuan itu penting tinggi tapi terutama permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak," tutur Airin.



Bidang Badan

Gamal: Titik Awal Ubah Wajah Perpolitikan Indonesia

“Kegiatan ini (Entrepreneur & Youth Summit 2022) menjadi titik awal kami di bidang Kepemudaan PKS, tugas kami satu memberikan ruang bagi anak muda di kancah politik, dan juga bagaimana agar anak muda bisa ikut berkontestasi serta mempunyai bargaining di perpolitikan Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran kami disini bukan hanya sekadar berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia, tapi kami juga ingin mengubah wajah perpolitikan di negeri ini menjadi santun, wibawa dan berkarakter,”

Gamal Albinsaid

Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS

Bidang Badan

Aliansi Lindungi Keluarga Indonesia Sampaikan Aspirasi Perlindungan dari Kejahatan Seksual ke PKS

"Tadi beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat perempuan yang tergabung dalam Aliansi Lindungi Keluarga Indonesia mendatangi kantor DPP karena ingin menyampaikan aspirasi terkait perlindungan dari kejahatan sosial. Kami berharap penyampaian aspirasi ini akan ditindaklanjuti menjadi pertimbangan produk kebijakan di perundang-undangan,"

Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS

Jakarta -- Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati beserta jajaran pengurus menerima kedatangan Aliansi Lindungi Keluarga Indonesia pada Sabtu (15/01/2022).

"Ya, tadi beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat perempuan yang tergabung dalam Aliansi Lindungi Keluarga Indonesia mendatangi kantor DPP karena

ingin menyampaikan aspirasi terkait perlindungan dari kejahatan sosial," jelas Mufida.

Mufida menyampaikan fenomena kejahatan seksual yang tampak ibarat gunung es.

"Penyebabnya bukan hanya karena kekerasan seksual seperti yang dilansir banyak media, namun juga merupakan akibat perilaku seks bebas dan penyimpangan seksual yang hingga kini belum ada payung hukum dan penanganannya," tutur Mufida.



Mufida mengatakan Aliansi Lindungi Keluarga Indonesia mendesak agar pemerintah memperhatikan kondisi darurat dari kejahatan seksual dengan membuat payung hukum penanganan yang komprehensif.

"Mereka menekankan perlunya semua perilaku asusila, baik

dilakukan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan, dapat diatur dalam perundang-undangan agar penanganan di masyarakat bisa mendapatkan payung hukum," ucap Mufida.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu perwakilan dari Aliansi Rida Hidayati yang berharap

pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi produk hukum.

"Kami berharap penyampaian aspirasi ini akan ditindaklanjuti menjadi pertimbangan produk kebijakan di perundang-undangan," ujar dia.

Bidang Badan

PKS Kalimantan Berduka, Imbau Laksanakan Shalat Ghaib



Jakarta - Ketua DPP BPW Kalimantan Partai Keadilan Sejahtera, Alifudin, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Rahman Amin Pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah

Kalimantan, periode 2004-2009/Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat

"Innalilahi Wainnailaihi Rojiun.

Telah berpulang ke

Rahmatullah dengan tenang Bapak Rahman Amin Mantan Ketua Wilda Kalimantan/Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat pada hari ini di RSPAD Jam 19.12 WIB yang kami terima langsung dari

istri Almarhum. Mohon Al Fatihah dan doa" Ucap Alifudin, disaat setelah proses pemakaman Almarhum di Depok Selasa (18/1/2022).

Bang Alif menyampaikan bahwa Anggota PKS Kalimantan khususnya Kalimantan Barat merasa kehilangan atas wafatnya almarhum dan Alifudin pun mendoakan agar almarhum ditempatkan bersama orang-orang baik.

"Kami Alifudin dan Keluarga besar PKS turut berduka cita atas Wafatnya Bapak Rahman Amin. Semoga Allah SWT mengampuni dosanya dan diterima amal perbuatannya serta keluarga yg ditinggalkan diberikan kesabaran. Aamiin" Tambah Alifudin.

Tampak di lokasi saat Alifudin dan keluarga almarhum melakukan pengurusan proses pemulasaran jenazah di RSPAD Gatot Suroto, Ambulance PKS tampak dalam melayani proses pemulasaran Jenazah ke rumah

duka di Kota Depok.

Di tempat terpisah, Arif Joni, selaku Ketua DPW PKS Kalimantan Barat sangat terpuak mendengar kabar wafatnya Alm. H. Rahman Amin.

"Kami biasa memanggil beliau Kang Maman, karena memang beliau orang yang mudah akrab, dan tentu kami seluruh anggota PKS se Kalbar sangat sedih atas kabar duka ini," ujarnya

Arif Juga menambahkan, begitu banyak kenangan dan peninggalan beliau untuk aktivitas dakwah di kalbar, bukan hanya PKS, banyak juga yang mendapatkan manfaat beliau saat menjadi anggota DPR RI.

Untuk itu Arif Joni menghimbau semua Anggota PKS di Kalbar untuk melaksanakan sholat ghaib, "Insya Allah kita akan adakan sholat ghaib untuk Almarhum," tutupnya

Bidang Badan

PKS: Ibu Kota Baru Ancam 10.000 Nelayan Balikpapan dan 16.000 Ha Lahan Mangrove

"Merusak mangrove sama saja dengan merusak lingkungan dan wilayah pesisir, sekaligus mengancam mata pencaharian nelayan yang sudah susah karena imbas adanya IKN ini"

Riyono

Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan

Jakarta - PKS secara tegas menyatakan menolak pemindahan ibu kota baru yang disahkan oleh DPR secara serampangan. Suara keras PKS kepada kebijakan Jokowi ini selalu mendapat dukungan publik, tokoh dan akademisi juga menolak pemindahan ibu kota baru. Nasib lingkungan dan kelestariannya dipertaruhkan dengan mega proyek IKN trilyunan rupiah.

"PKS selalu melihat urgensi dan apa manfaatnya untuk rakyat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pemindahan ibu kota ditengah kondisi pandemi serta utang negara yang menumpuk buat apa? Gak ada untungnya untuk rakyat. Hanya menguntungkan oligarki dan merenggut kedaulatan rakyat," papar Riyono Ketua DPP PKS bidang

Tani dan Nelayan

Hasil kajian kawan - kawan aktifis Forest Watch Indonesia menyebutkan bahwa hasil kajian menunjukkan, lebih dari 16 ribu hektar ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN dan rencana pembangunan akibat RTRWP.

Ekosistem mangrove merupakan tutupan lahan yang tepat saat ini, karena dari hasil kajian kami sepanjang pesisir teluk memiliki Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir yang tinggi, tidak cocok jika dilakukan konversi-dibangun atau dijadikan permukiman bahkan kawasan industri.

Menurut Riyono kawasan mangrove adalah "nyawa" bagi

nelayan kecil dan tradisional, di lahan mangrove ikan akan berkembang biak. Mangrove adalah nursery ground bagi ikan dan pemijahan bagi ikan. Hilangnya 16.000 Ha lahan mangrove akan merusak dan memperparah kerusakan lingkungan di IKN.

"Merusak mangrove sama saja dengan merusak lingkungan dan wilayah pesisir, sekaligus mengancam mata pencaharian nelayan yang sudah susah karena imbas adanya IKN ini," tambah Riyono.

Catatan KIARA pada 2019 di Kaltim ada 10 ribu lebih nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), 2.984



nelayan dari Kab Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Kota Balikpapan.

"Apa pemerintah akan menanggung hidup 10.000 nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian mereka? Tiap bulan minimal nelayan bisa mendapatkan penghasilan 2 - 3 juta dari hasil tangkap mereka. Ini jelas sangat merugikan nelayan," tambah Riyono.

Kerusakan 16.000 hektar lahan mangrove dan hilangnya mata pencaharian 10.000 nelayan lebih di lokasi IKN jelas sangat merugikan rakyat dan lingkungan hidup. Lalu kenapa pemerintah begitu ngotot memindahkan ibu kota? PKS akan menggalang dan mengajak para nelayan untuk terus menyuarakan penolakan pemindahan ibu kota ditengah keuangan negara yang sedang merana.

Bidang Badan

Muhammad Kasuba Targetkan PKS Papua Barat Rebut Kursi DPR RI

“Pada Pemilu 2024, PKS Papua Barat saatnya menciptakan momentum dan sejarah dalam wajah perpolitikan di Papua Barat, dengan target 1 kursi DPR RI dari Dapil Papua Barat. Visi untuk berfikir prospektif dan ekspansif terutama lewat kontribusi dan pelayanan di masyarakat harus diwujudkan. PKS mesti menjadi milik masyarakat Papua Barat,”

Muhammad Kasuba
Ketua DPP PKS BPW Intim

Bidang Badan

Yanuar Arif Serahkan 2 Unit Ambulance Perkuat Pelayanan PKS Banyumas dan Cilacap



Yanuar Arif Wibowo Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Kepemudaan menyerahkan 2 unit mobil ambulance kepada DPD PKS Kabupaten Banyumas dan Cilacap untuk memperkuat pelayanan PKS kepada rakyat yang membutuhkan di dua wilayah tersebut, Minggu 23 Januari 2022. Penyerahan 2 unit ambulance ini disaksikan

langsung kepada Ketua DPD PKS Banyumas Setya Arinugroho dan Ketua DPD PKS Cilacap Prayitno.

Yanuar dalam sambutannya menyitir pesan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri yang menekankan agar seluruh kader PKS hadir di tengah-tengah rakyat, memberikan pelayanan terbaik,

sesuai batas kemampuan masing-masing.

"Gen PKS adalah pelayanan, dan hal ini diulang-ulang oleh pimpinan tertinggi PKS Habib Salim Segaf Aljufri agar pejabat publik dan kader-kader PKS terus melayani, membantu, dan mengadvokasi kebutuhan rakyat. 2 unit mobil ambulance ini kami dedikasikan untuk

"Gen PKS adalah pelayanan, dan hal ini diulang-ulang oleh pimpinan tertinggi PKS Habib Salim Segaf Aljufri agar pejabat publik dan kader-kader PKS terus melayani, membantu, dan mengadvokasi kebutuhan rakyat. 2 unit mobil ambulance ini kami dedikasikan untuk mengokohkan semangat pelayanan tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap,"

Yanuar Arif Wibowo

Wakil Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan

mengokohkan semangat pelayanan tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap," ungkap Yanuar.

Dewan Pembina Pusat Gema Keadilan dan Presidium KA KAMMi berharap dengan armada ambulance ini semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan gratis sehingga kehadiran PKS makin dirasakan dan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan rakyat kepada PKS pada pemilu 2024.

Senada Ketua DPD PKS

Banyumas Setya Arinugroho dan Ketua DPD PKS Cilacap Prayitno juga mengucapkan terima kasih atas bantuan armada ambulance ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih lagi di masa pandemi saat ini. Selanjutnya, DPD akan mensosialisasikan secara masif tambahan armada ambulance ini agar pemanfaatannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan semakin optimal. "Insyallah semakin kuat motivasi kader untuk melayani masyarakat," pungkasnya.

Nantikan terus E-Magazine KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



E-MAGAZINE

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia

KABARPKS | Diterbitkan oleh Bidang Humas dan PPID DPP PKS

Penanggung Jawab: Ahmad Mabruki (Ketua DPP PKS Bidang Humas)

Pemimpin Redaksi: Hafidz Muftisany | Redaktur Pelaksana: Erwyn Kurniawan

Redaksi: Arya Jagad Pamungkas, Hanifah Irfham | Fotografer: Muhammad Hilal, Dhani, Donny (PKS Foto)

Desain & Layout: Azam Muhammad (PKS Art)

Alamat Redaksi: MD Building | Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail humas@pks.id



Download e-Newsletter
KABARPKS di pks.id